



Analisis Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra Sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Volume 10 Issue 2

(September, 2004)

e-ISSN 2716-5191

Mochamad Yunus¹, Martin Roestamy²

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Indonesia

² Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 11, 2024

Revised version received: September 27, 2024

Accepted: September 27, 2024

Available online: September 29, 2024

Keywords:

Kawasan industri, pengembangan, Strategis nasional, kesejahteraan.

How to Cite:

Mochamad Yunus, Martin Roestamy. 2024. "Analisis Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra Sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Name: Mochamad Yunus

Email: yunus.adiarsa@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) di Sulawesi Tenggara telah menarik perhatian yang signifikan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi daerah melalui proyek strategis nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis pelaksanaan KISA dengan mempertimbangkan kedaulatan negara dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta implikasi terhadap hak-hak masyarakat dalam pengembangan KISA. Temuan analisis menunjukkan bahwa pengembangan KISA memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur. pelaksanaan proyek menghadirkan tantangan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan integrasi sosial yang inklusif. rekomendasi meliputi penegakan hukum yang ketat, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan strategi mitigasi risiko yang efektif. pembuat kebijakan, pengembang, dan masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan kedaulatan negara dalam setiap langkah pelaksanaan proyek strategis nasional seperti KISA. Kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara dapat terwujud.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)



ABSTRACT

The development of the Stargate Astra Industrial Estate (KISA) in Southeast Sulawesi has garnered significant attention as part of Indonesia's government initiative to strengthen regional economy through a national strategic project. This study aims to critically analyze the implementation of KISA while considering state sovereignty in the context of natural resource management policies and regional development. The research employs a mixed-methods approach combining qualitative and quantitative analyses to explore the economic, social, and environmental impacts, as well as the implications for community rights in KISA development. Literature review emphasizes the need for balance between economic development and environmental conservation, as well as the importance of social sustainability in industrial area development processes. The analysis findings indicate that KISA development holds substantial potential to enhance local economic growth through job creation and infrastructure improvements. However, the project implementation also presents challenges related to sustainable environmental management and inclusive social integration. Therefore, recommendations include rigorous law enforcement, active community participation in decision-making, and effective risk mitigation strategies. This study aims to provide deep insights to policymakers, developers, and communities on the importance of considering state sovereignty in every step of implementing national strategic projects like KISA. Thus, ensuring sustainable economic growth without compromising environmental sustainability and local community welfare in Southeast Sulawesi.

1. Pendahuluan

Konsep hak menguasai negara atas tanah telah ada sejak zaman pra kolonial, di mana penguasa atau kerajaan memiliki kontrol penuh atas tanah dalam wilayahnya. Apabila melihat dari kacamata hukum, dahulu kala konsep tersebut dimulai dari hukum adat. Menurut hukum adat, benda yang dianggap sebagai kepentingan bersama, seperti air, sumber daya alam, tanah, dan ilmu pengetahuan, harus dimiliki bersama. Walaupun hukum adat mengakui hak individu atas benda, ia mendahulukan prinsip perlindungan kepentingan bersama dan menjunjung fungsi sosial benda. Konsep tersebut kemudian dikembangkan dalam rumusan Undang Undang Dasar 1945 ketika Indonesia telah merdeka. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Pokok pemikiran dalam undang-undang tersebut melahirkan konsep lebih terang yang dituang dalam Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Namun perlu diketahui, salah satu konsep yang telah lama diusung oleh pemerintah adalah reforma agraria, yang bertujuan untuk restrukturasi kepemilikan tanah, penguasaan maupun penggunaan tanah agar lebih adil dan produktif. Reforma agraria di Indonesia telah melalui berbagai tahap dan program sejak masa kemerdekaan, dengan salah satu program yang signifikan adalah Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dicanangkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah kepada masyarakat yang terdiri dari 4,5 juta hektar tanah pertanian dan 4,5 juta hektar tanah di kawasan hutan. Program ini perlu terus dikaji dan dilakukan pengawasan atas pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan. Selanjutnya konsep pengelolaan tanah di Indonesia menjadi isu yang penting untuk terus dibahas demi mewujudkan kepentingan bersama.

Atas konsep terdahulu yang telah dijabarkan diatas, pemerintah masa kini mengadopsinya dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN adalah program pemerintah yang diciptakan untuk tujuan jangka panjang demi kesejahteraan negara yang sifatnya prioritas dan berskala besar/nasional. Salah satu wujud PSN yang akan Penulis kritisi

disini ialah perihal Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, yang berada di Sulawesi Tenggara. Urgensi dalam membahas proyek pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra cukup penting karena proyek ini memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan yang perlu dianalisis secara mendalam. Penulis harap, melalui penelitian ini dapat mengevaluasi kontribusi kawasan industri terhadap inovasi teknologi dan integrasi dalam rantai pasok global. Aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan untuk memastikan praktik ramah lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang informatif bagi pengambil keputusan untuk memaksimalkan manfaat dan memitigasi potensi risiko dari pengembangan proyek ini.

Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) di Sulawesi Tenggara menjadi fokus utama dalam inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi regional melalui proyek strategis nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap implementasi KISA dengan mempertimbangkan hak menguasai negara dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan wilayah.

Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekonomi regional melalui proyek strategis nasional. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak menguasai negara menjadi landasan utama yang mengatur perihal sumber daya alam di Sulawesi Tenggara dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan industri.

Namun, implementasi proyek strategis nasional seperti KISA tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang muncul. Salah satu tantangan utama ialah guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem lokal, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Selain itu, integrasi sosial masyarakat lokal dalam proses pembangunan juga menjadi perhatian penting. Diperlukan Upaya untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari pembangunan ini secara adil dan berkelanjutan, serta tetap mempertahankan identitas budaya mereka.

Dalam konteks ini, analisis kritis terhadap pengembangan KISA perlu dilakukan untuk memahami secara mendalam dampak-dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini juga perlu mempertimbangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan wilayah dapat memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang mendalam kepada pembuat kebijakan, pengembang, dan masyarakat mengenai pentingnya mempertimbangkan hak menguasai negara dalam implementasi proyek strategis nasional seperti KISA. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal di Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, latar belakang masalah ini menggaris bawahi perlunya analisis yang mendalam terhadap implementasi proyek strategis nasional seperti KISA, yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga mengintegrasikan perspektif hak menguasai negara, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial dalam pengembangan kawasan industri.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam mengkritisi proyek pengembangan kawasan industri Stargate Astra ialah metode studi literatur yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap literatur terkait pengembangan kawasan industri, dengan menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta pentingnya keberlanjutan sosial. Teknik pengumpulan data yaitu metode kualitatif meliputi wawancara dan survei dengan pemangku kepentingan. Analisis kuantitatif melibatkan penggunaan data statistik mengenai dampak ekonomi dan evaluasi lingkungan. Selain itu, teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data dilakukan juga melalui penelaahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, dan metode observasi¹ yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.² Dalam hal ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait regulasi hukum, kebijakan publik, dan studi kasus terkait pengembangan industri di Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Sebagaimana jenis dan metode penelitiannya maka penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.³ Untuk mendukung kajian yuridis normatif sebagaimana di atas, maka dalam penelitian ini juga dilakukan kajian yuridis empiris secara sederhana dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait termasuk para pakar yang memiliki kompetensi dibidang yang terkait dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penetapan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) dalam perspektif kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mencerminkan cita-cita hukum negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (*Welfare state*) yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila-sila Pancasila. Amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, serta memiliki tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, memajukan kesejahteraan umum bukan hanya hak tetapi juga tugas dan tanggung jawab konstitusi negara Indonesia.⁴ Teori Negara Kesejahteraan, menurut Spicker, mengacu pada sistem yang menegaskan bahwa negara (pemerintah) memainkan peran utama dalam alokasi dana publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan bertujuan untuk menyediakan pelayanan sosial yang komprehensif bagi semua penduduk dan mengintegrasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan

¹Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020. Hlm. 42.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, Hlm. 41.

⁴ Sihotang, S. Law Paradigm Development to Reduce Housing Backlog. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 9(1). 2017, Hlm. 91-112.

berkelanjutan. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negara.⁵

Perwujudan konsep tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Akan tetapi, regulasi tersebut memiliki resiko multitafsir sehingga disalahgunakan pendistribusiannya. Pokok masalah atas ketidaksesuaian konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ialah dalam bentuk perusahaan dan penguasaan negara atas sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, justru sepenuhnya diserahkan ke swasta yang menyebabkan hilangnya kontrol negara karena sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar.

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk dalam hal bahan tambang seperti nikel.⁶ Diketahui bahwa pemegang proyek Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra adalah swasta yakni Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang telah mengakuisisi PT. Anugerah Surya Pacific Resources sebagai holding pemilik tambang nikel Stargate dengan nilai transaksi akuisisi sebesar US\$104,91 juta setara Rp1,64 triliun. Ditetapkannya sebuah program menjadi PSN berarti pemerintah dalam hal ini negara memberikan fasilitas istimewa bagi program tersebut untuk dijalankan. Fasilitas yang diberikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup beberapa aspek utama, yaitu kemudahan perizinan, pembiayaan, jaminan pemerintah, dan penanganan dampak sosial. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kemudahan Perizinan: Diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, persiapan, transaksi, konstruksi, dan pengendalian operasi. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan PSN.
2. Pembiayaan: Pembiayaan PSN dapat bersumber dari APBN/APBD atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pembiayaan ini harus memperhatikan integrasi teknis dengan rencana sektor terkait, kelayakan ekonomi dan finansial, serta kemampuan keuangan Badan Usaha yang terlibat.
3. Jaminan Pemerintah: Pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap pembiayaan PSN yang berasal dari sumber pembiayaan yang sah, seperti kredit, pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), dan risiko politik.
4. Penanganan Dampak Sosial: Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menyiapkan program dan anggaran penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh pelaksanaan PSN. Program ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau daerah.

Poin-poin tersebut di atas mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif bagi masyarakat yang terlibat.

Ditetapkannya Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) di Sulawesi Tenggara menjadi PSN tentu akan memberikan keuntungan bagi proses pelaksanaan

⁵ Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 13 (1), 2006, Hlm. 27-37.

⁶ Setiawan, K. N. S., Achmadi, T., & Lazuardi, S. D. Analisis Skala Penambangan Mineral Dan Pengangkutan: Studi Kasus Angkutan Nikel Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Teknik Its (Sinta: 4, If: 1.1815)*, 7(1), 2018, Hlm. E43-E48.

pengembangannya. Analisis kritis terhadap regulasi yang mendasari proyek ini menyoroti kebutuhan akan konsistensi dengan hukum dan peraturan yang ada, serta peningkatan transparansi dalam berjalannya proyek. Kritik ini menyoroti perlunya memastikan bahwa keputusan terkait sepatutnya diambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tanggung jawab penuh atas sumber daya alam Indonesia adalah negara. Konsep penguasaan disini dilakukan sebagai pengelola dengan tujuan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mendeskripsikan cara pengorganisasian pelayanan sosial, tetapi juga sebagai konsep normatif yang menekankan hak setiap orang untuk menerima pelayanan sosial. Konsep ini sering dianggap sebagai hasil dari ideologi sosialisme.⁷ Begitu halnya dalam pengelolaan pertambangan di sebuah negara.

Pertambangan ialah suatu kegiatan ekstraksi mineral dan bahan tambang dari dalam bumi. Proses ini dikenal sebagai penambangan, di mana material yang dapat diekstraksi diambil dari bumi. Tambang sendiri adalah lokasi di mana kegiatan penambangan dilakukan. Dalam konteks geografi, manusia dipelajari sebagai subyek yang berinteraksi timbal balik dengan bumi, tidak hanya dalam hubungan antar manusia tetapi juga dalam hubungannya dengan unsur-unsur fisik bumi untuk kemajuan bersama.⁸

Pada 2021, Stargate melakukan diversifikasi bisnis ke proyek mineral, yakni pembangunan smelter feronikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara melalui PT. Stargate Mineral Asia. Stargate Pasific Resources sendiri merupakan perusahaan tambang nikel milik swasta yang berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Stargate memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi dengan luas lahan mencapai 1.647 hektare (ha). Selanjutnya, Stargate sedang melakukan diversifikasi bisnis ke sektor mineral dengan proyek pembangunan smelter feronikel di Konawe Utara. Sulawesi Stargate Pasific Resources merupakan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Stargate memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi dengan luas lahan mencapai 1.647 hektar.⁹

Sebagai perwujudan negara hukum, yang dapat dilihat dari perspektif teori hukum Pembangunan,¹⁰ bahwa pembangunan nasional berfungsi sebagai sarana untuk membarukan masyarakat dan sebagai alat untuk mengatur arah kegiatan manusia sesuai dengan tujuan Pembangunan atau pembaruan yang diinginkan. Fungsi utama hukum adalah tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban, tetapi juga mengatur untuk mencapai perubahan sosial dan rekayasa sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam konteks pembentukan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, diperlukan sebuah desain besar hukum yang berfokus pada pembaharuan masyarakat, yang mengikuti perubahan sosial dan rekayasa sosial, serta memperhatikan budaya hukum masyarakat, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan

⁷ Laurensius Arliman S. Lembaga-lembaga Negara Independen di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Deepublish

⁸ Rustam, P., & Roestamy, M. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian C Dalam Perspektif Pengupahan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(2), 2018, Hlm. 104-113.

⁹ Buildingresilience, Laporan Tahunan Annual Report 2023 Pt United Tractors Tbk.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute Dan Huma, Jakarta, 2012, Hlm. 15.

dokumen lingkungan hidup menjadi kunci untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan memastikan kepatuhan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup.

Nilai filosofi yang terkandung di balik *legal culture* ialah guna menghadirkan hukum sebagai alat untuk memberikan pembaharuan pada masyarakat. Dalam merekonstruksi teori hukum pembangunan, pembuat kebijakan dalam pembentukan hukum di bidang lingkungan dan sumber daya alam harus memiliki pendekatan holistik dan komprehensif, serta interdisipliner untuk memastikan bahwa hukum mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan hidup.¹¹

Narasi tentang fungsi hukum dalam pembangunan nasional dapat dikaitkan dengan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA), Sulawesi Tenggara, sebagai Proyek Strategis Nasional dalam konteks hak menguasai negara, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengembangan KISA sebagai Proyek Strategis Nasional menunjukkan bagaimana hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur dan memfasilitasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia;
- 2) Sebagai proyek strategis, KISA memerlukan desain hukum yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan ketertiban, tetapi juga mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan hidup dan integrasi sosial yang diatur melalui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Filosofi *legal culture* dalam konteks ini menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen pembaharuan sosial. Di tengah tantangan lingkungan hidup dan keberlanjutan, pembentukan hukum di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk proyek seperti KISA harus mempertimbangkan pendekatan holistik yang mempromosikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai pengatur perubahan sosial yang mendukung Pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Tenggara.

Dampak Tantangan dan Rekomendasi dalam Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA)

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yeni Nuraeni¹² bahwa dampak dari pembangunan industri nikel berdampak pada adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Meskipun demikian, perkembangan industri nikel juga membawa dampak negatif seperti budaya hidup konsumtif dan kurangnya motivasi untuk pengembangan usaha, serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan hasil instan. Peran pemerintah dianggap krusial dalam meningkatkan motivasi masyarakat, memperkuat kompetensi, dan membina kemampuan agar mereka mampu mengambil peluang kerja yang lebih baik serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal.

Dalam konteks Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) di Sulawesi

¹¹ Nugroho, W. Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 2017, Hlm. 369-382.

¹² Nuraeni, Y. Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1, 2018).

Tenggara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat dampak ekonomi yang signifikan yang dapat diamati:

- a. Penciptaan Lapangan Kerja: Pendirian KISA di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Dengan adanya industri baru, baik dalam sektor manufaktur maupun pendukungnya, akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Pengembangan Infrastruktur: Proyek PSN seperti KISA juga mendorong pengembangan infrastruktur di sekitar kawasan. Peningkatan infrastruktur jalan, transportasi, dan utilitas lainnya tidak hanya mendukung kegiatan industri, tetapi juga memperbaiki konektivitas regional. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta mengurangi biaya logistik.
- b. Peningkatan Aktivitas Ekonomi: Hadirnya KISA sebagai pusat industri dapat memicu pertumbuhan sektorekonomi lainnya di sekitarnya. Dengan adanya industri baru, akan adanya permintaan tambahan terhadap berbagai produk dan layanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal secara keseluruhan.
- c. Pendapatan Daerah dan Pajak: Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan pendirian industri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri dan pajak dari perusahaan serta tenaga kerja dapat meningkat. Peningkatan pendapatan ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- d. Peningkatan Investasi: Keberadaan KISA sebagai PSN juga dapat menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi ini tidak hanya dalam bentuk modal untuk membangun fasilitas industri, tetapi juga dalam bentuk peningkatan teknologi dan transfer pengetahuan yang dapat meningkatkan kapasitas lokal dalam industri tersebut.

Dengan demikian, pengembangan KISA sebagai PSN di Sulawesi Tenggara tidak saja memberikan dampak ekonomi lokal yang signifikan, tetapi juga berpotensi untuk mengubah lanskap ekonomi regional dengan memberikan peluang baru bagi pertumbuhan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang proyek ini terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, serta menerapkan strategi mitigasi yang efektif. Hingga saat ini, informasi yang penulis dapat terkait lokasi dan status proyek Industri Stargate Astra masih sangat terbatas. Hal ini pula yang harus menjadi perhatian terkait transparansi data dan informasi.

Pengadaan proyek besar tentu perlu diperhatikan beberapa hal di atas. Seperti akan adanya penggusuran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan migrasi paksa tidak hanya bagi penduduk tetapi juga binatang. Meskipun begitu, apabila terdapat dampak positif tetap harus diakui dan didukung. Kehadiran kegiatan ekonomi baru yang tentunya diikuti dengan kegiatan ekonomi lainnya diperkirakan akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dari penerimaan pajak. Proyek yang didukung oleh pengembangan infrastruktur ini akan membawa dampak luas bagi aktivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Dalam menjalankan proyek strategis nasional ini, kebijakan negara tentunya menjadi landasan utama untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan keamanan bagi semua pemangku kepentingan. Namun, ketika proyek-proyek tersebut tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, dampaknya bisa sangat merugikan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kebijakan yang ada, memperbaiki celah-celah dalam regulasi, dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah terulangnya

pelanggaran serupa di masa depan. Hanya dengan melakukan langkah- langkah ini, negara dapat memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak lingkungan dan sosial masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Aturan-aturan perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk diantaranya terkait pertanahan dan keberadaan tenaga ahli yang turut berkerja di Indonesia. baik berupa aturan dan mekanisme administrasi status ketenagakerjaan, serta mekanisme pertanggungjawaban kerja tenaga ahli asing tersebut di Indonesia.¹³

Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra sebagai Proyek Strategis Nasional, meliputi:

- a. Pengelolaan Lingkungan: Pengembangan KISA di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam seperti lahan dan air dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang serius, termasuk kerusakan hutan, penurunan kualitas air, dan meningkatnya risiko bencana alam;
- b. Integrasi Sosial: Integrasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pengoperasian KISA menjadi tantangan yang signifikan. Pemenuhan hak-hak masyarakat adat, pelestarian identitas budaya, dan pemerataan manfaat ekonomi antara masyarakat lokal dengan investor swasta menjadi isu krusial;
- c. Kepatuhan Regulasi: Penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ketat seringkali menjadi tantangan. Terdapat risiko pengabaian atau pelanggaran terhadap regulasi lingkungan yang berpotensi merugikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Ketergantungan KISA pada infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan air bersih adalah tantangan penting. Kekurangan infrastruktur yang memadai dapat menghambat operasional dan pertumbuhan KISA.

Adapun rekomendasi yang diusulkan guna keberhasilan serta keberlanjutan ialah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum yang Ketat: Diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap regulasi lingkungan dan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat lokal;
- b. Partisipasi Masyarakat: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan KISA. Pemerintah perlu membangun mekanisme konsultasi dan dialog yang efektif untuk memastikan kepentingan masyarakat lokal terwakili dan diperhatikan. Termasuk dalam hal ketersediaan kehidupan bagi masyarakat seperti rumah, karena ketika industri berkembang cepat otomatis dibutuhkan ketersediaan rumah bagi pihak-pihak yang terlibat juga bagi masyarakat setempat dan itu semua perlu dipersiapkan serta direncanakan sejak dini guna menghindari potensi merugikan salah satu pihak, seperti nilai harga tanah yang terus naik;¹⁴
- c. Implementasi Strategi Mitigasi Risiko : Perlu dikembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang mungkin timbul

¹³ Roestamy, M. Indonesian Property Law In Global Competition. *Law And Humanities Quarterly Reviews*, 1(2), 2022.

¹⁴ Roestamy, M. Providing Affordable Housing For Low-Income People In Indonesia (Development Of Model On Housing Law). *Ijasos- International E-Journal Of Advances In Social Sciences*, 3(9), 2017, Hlm. 1094-1103.

selama pembangunan dan operasional KISA. Hal ini termasuk dalam hal mitigasi dampak terhadap lingkungan hidup, pencegahan konflik sosial, dan pemulihan ekosistem;

- d. Pembangunan Kemitraan Kolaboratif: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan KISA. Kemitraan ini perlu didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, transparansi, dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang disarankan, KISA dapat menjadi model pembangunan industri yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal di Sulawesi Tenggara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka Penulis merumuskan beberapa poin kesimpulan, yaitu:

- a) Penetapan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra (KISA) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan berbagai fasilitasi istimewa dalam pelaksanaannya seperti kemudahan perizinan, pembiayaan, jaminan pemerintah, dan penanganan dampak sosial. Meskipun demikian, analisis kritis terhadap regulasi yang mendasari proyek ini menyoroti perlunya konsistensi dengan hukum dan peraturan yang ada, serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaannya. Kritik ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan tanggung jawab penuh kepada negara dalam mengelola sumberdaya alam, laporan ini menyoroti perlunya pelaksanaan yang mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan integrasi sosial membutuhkan langkah-langkah konkret seperti penegakan hukum yang ketat terhadap regulasi lingkungan, pemberdayaan partisipasi masyarakat, dan strategi mitigasi risiko yang efektif. Sehingga penyelenggaraan pembangunan PSN senantiasa menjaga hak-hak masyarakat bahkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) Tantangan dan rekomendasi dalam proyek ini meliputi: (1) Konsistensi Regulasi: Memastikan bahwa kebijakan proyek KISA sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku melalui evaluasi mendalam dan penerapan standar yang konsisten; (2) Transparansi dan Partisipasi Publik: Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan aksesibel, serta membangun mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan dukungan publik; (3) Penegakan Hukum: Menerapkan penegakan hukum yang ketat terhadap regulasi lingkungan untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan proyek; (4) Strategi Mitigasi Risiko: Mengembangkan strategi mitigasi risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko, merencanakan tindakan preventif, dan respon cepat, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat lokal.

Penelitian mendatang sebaiknya difokuskan pada pemantauan implementasi

rekomendasi serta evaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan industri seperti KISA. Studi jangka panjang juga dapat mengevaluasi dampak sosio-ekonomi lebih luas di luar wilayah langsung Kawasan industri tersebut.

Referensi

- Building Resilience, Laporan Tahunan (*Annual Report*), 2023 PT United Tractors Tbk.
- Laurensius Arliman S. Lembaga-lembaga Negara Independen di Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Deepublish. Yogyakarta. 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 13 (1), 2006.
- Nugroho, W. Rekonstruksi teori Hukum Pembangunan Ke dalam pembentukan Perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi dalam Bangunan negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 2017.
- Nuraeni, Y. Dampak perkembangan industri pertambangan nikel terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1), 2018.
- Roestamy, M. Providing affordable housing for low-income people in Indonesia (Development of model on housing law). *IJASOS-International E-journal of Advances in Social Sciences*, 3(9), 2017.
- Roestamy, M. Indonesian Property Law in Global Competition. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(2), 2022.
- Rustam, P., & Roestamy, M. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian C Dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(2), 2018.
- Setiawan, K. N. S., Achmadi, T., & Lazuardi, S. D. Analisis skala penambangan mineral dan pengangkutan: Studi kasus angkutan nikel di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Teknik ITS (SINTA: 4, IF: 1.1815)*, 7(1), 2018.
- Sihotang, S. Law Paradigm Development To Reduce Housing Backlog. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 9(1), 2017.